



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 93 Tahun 2021);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Seri D);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja Sekretariat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Sekretariat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka menengah daerah dan Renstra Sekretariat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah:
 - a. sebagai dokumen perencanaan bagi Sekretariat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai

indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

- b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja *impact* sasaran, *outcome* program dan *output* kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah:
- a. sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
 - b. menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Dalam menyusun RKA Tahun 2024.
 - c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV SISTEMATIKA RENJA

Pasal 4

- (1) Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah, Review terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah, program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Tahun 2024.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

- (2) Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah melaksanakan Renstra Tahun 2019-2024 melalui penyusunan Renja tiap tahunnya.
- (2) Sekretariat Daerah melaksanakan Renja melalui penyusunan RKA dan DPA Sekretariat Daerah Tahun 2024.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Sekretariat Daerah Tahun 2024 berpedoman atau mengacu pada indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan pembangunan dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024.

BAB VI PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (2) Pejabat Administrator atau pejabat fungsional yang setara selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target *outcome* program yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *outcome* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (3) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output* dan akan dievaluasi capaian

realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.

- (4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, *outcome* dan *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

Lampiran: PERATURAN BUPATI CIREBON
Nomor : 49 TAHUN 2023
Tanggal: 14 Agustus 2023
Tentang: RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon adalah dokumen Sekretaris Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dilakukan atas dasar:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Cirebon;
- c. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- d. Pemecahan masalah yang dihadapi; dan
- e. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Proses penyusunan Renja perangkat daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja perangkat daerah dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu sesuai Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal perangkat daerah yang selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Berikut bagan alir penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Bagan Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Seiring dengan tuntutan agar pemerintah lebih efektif dan efisien di satu sisi dan di sisi lain pihak dunia usaha dan masyarakat dapat berperan lebih besar dalam berbagai kegiatan pembangunan, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon harus lebih memantapkan fungsinya sebagai regulator, fasilitator dan *controller* sehingga pengendalian pembangunan kepada masyarakat tetap terjaga.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 2).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 ditetapkan dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon untuk kurun waktu tahun 2024 yang mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
2. Sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja impact sasaran, outcome program dan output kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di samping mempunyai maksud sebagaimana tersebut di atas, penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 juga bertujuan untuk :

1. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah;

2. Menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2024.

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, dan kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon pada dasarnya adalah penjabaran perencanaan tahunan dan dalam Renja disajikan pengukuran terhadap kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Setda Kabupaten Cirebon selama tahun 2022. Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan/sub kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya, dalam evaluasinya dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan Pencapaian Kinerja

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, beberapa faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja yang sudah direncanakan antara lain :

- Belum maksimalnya koordinasi dan partisipasi seluruh unsur penunjang dalam penyusunan rencana kerja dan rencana strategis di lingkup Sekretariat Daerah;
- Lemahnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Dengan kondisi demikian berimplikasi terhadap pencapaian target sasaran yang sudah direncanakan sekaligus mempengaruhi penilaian kinerja perangkat daerah dan personil yang melaksanakan kegiatan. Disisi lain, akan berpengaruh terhadap serapan anggaran yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah.

Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022, pencapaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pelaksanaan Renja tahun 2022, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
 Kabupaten Cirebon

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Kinerja Renja s/d Renja Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Thn 2022 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja s/d Thn 2022 (%)		Unit Kerja Perangkat Daerah					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13x100%		15	
0.00	NON BIDANG URUSAN																								
0.00.01	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENUHANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Peningkatan Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi pemerintahan. (Sasaran: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	114.113.846.008	99	16.881.633.133	100	111.596.918.707	18.60	2.334.373.045	36.92	7.472.989.838	93.01	12.662.085.569	100	10.774.884.809	100	20.774.884.809	100	37.656.537.944	100	17.59	BAGIAN UMUM	
			Nisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKP). (Sasaran: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	75	3.765.000.000	70	238.332.519	72	228.013.650	72	46.197.300	72	84.631.800	72	148.505.000	72	227.690.100	72	227.690.100	72	446.022.619	96	11.85	BAGIAN ORGANISASI	
			Prosentase Jumlah Rancangan Produk Hilum tertang Kembanggaan dan Organiasai Daerah Kabupaten Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	3.486.361.100	100	229.596.061	100	258.664.250	0	34.387.580	0	101.704.660	0	174.691.100	100	256.887.970	100	256.887.970	100	486.484.031	100	13.95	BAGIAN ORGANISASI	
			Prosentase Meningkatnya Satisfya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Non Kumulatif Meningkat)	62		0		63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Prosentase Keberhasilan Kerjasama (Sasaran: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100		0		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Prosentase Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (Sasaran: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	13.577.540.543	77	384.381.300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384.381.300	77	3.06	
			Prosentase Informasi yang di Searluaskan di kabupaten Cirebon. (Sasaran: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100		72		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72		

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra PD)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2022 (Tahun 1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2022 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2022)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Renstra PD s.d Thn 2022 (%)			Unit Kerja Penanggung Jawab							
				5			6			7			8				9				10				11				12			13-14-15			
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp		K	Rp		K
0.00.01.2.02.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Sisuan, Dok - Kumulatif)	2	218.742.359	0	52.126.200	1	70.453.900	0	2.722.900	0	15.951.750	0	45.110.550	1	70.294.700	1	70.294.700	1	122.420.900	50	43.92	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN											
0.00.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyelenggaraan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Diambil yang telah selesai (Sisuan, Dok - Kumulatif)	2	153.372.286	0	52.228.000	1	52.228.000	1	46.174.000	1	46.174.000	1	50.674.000	1	50.674.000	1	50.674.000	1	50.674.000	50	33.04	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN											
0.00.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyelenggaraan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Ditinjau dan Disetujui (Sisuan, Dok - Kumulatif)	12	402.059.100	6	31.716.028	6	108.682.100	0	11.987.026	1	38.947.672	4	69.135.708	6	108.664.244	6	108.664.244	6	140.380.272	50	34.92	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN											
0.00.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Berita Acara Revi Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah (Sisuan, BA - Kumulatif)	4	3.445.862.515	1	237.234.166	1	318.389.900	0	3.000.000	0	11.970.600	0	37.770.600	0	316.798.336	0	316.798.336	0	362.249.202	0	16.13	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN											
0.00.01.2.03.02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa layanan barang yang Dibekankan (Sisuan, Dok - Kumulatif)	4	3.265.862.515	2	237.234.166	2	337.510.300	0	0	0	0	0	0	0	236.027.736	2	236.027.736	2	472.281.902	50	14.49	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN											
0.00.01.2.03.06		Perawatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pengadministrasian Pengamanan (Sisuan, Dok - Kumulatif)	2	220.000.000	0	0	1	80.770.600	0	3.000.000	0	11.970.600	1	37.770.600	1	80.770.600	1	80.770.600	1	80.770.600	50	36.71	BAGIAN UMUM											
0.00.01.2.03		Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Berita Acara Revi Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah (Sisuan, BA)	4	2.349.791.050	1	508.330.350	1	562.866.600	0	1.882.263.600	0	365.022.300	0	473.154.000	0	558.892.600	0	558.892.600	0	1.067.223.150	0	45.42	BAGIAN UMUM											
0.00.01.2.05.02		Pengadaan Pakan Dinas Beserta Alat Kelengkapannya	Jumlah pakan dinas yang dibutuhkan (Sisuan, jenis - Kumulatif)	21	1.899.791.050	7	508.330.350	7	487.690.000	0,02	177.720.000	2,03	349.227.000	5,03	419.287.000	7	483.907.000	7	483.907.000	7	992.237.500	33,33	52,23	BAGIAN UMUM											
0.00.01.2.05.03		Penyediaan dan Pengolahan Administrasi Kepengawasan	Tersedianya Data Administrasi (Sisuan, Dok - Kumulatif)	1	200.000.000	0	0	1	74.996.600	0,04	10.543.600	0,10	35.995.300	0,35	53.867.000	1	74.985.600	1	74.985.600	1	74.985.600	100	37,49	BAGIAN UMUM											
0.00.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pejabat yang memikul kompetensi (Sisuan, Orang - Kumulatif)	35	250.000.000	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM											
0.00.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Revi Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah (Sisuan, BA)	4	29.613.463.315	1	5.334.768.988	1	7.147.578.275	0	965.622.764	0	2.535.526.658	0	4.631.099.402	0	7.127.325.894	0	7.127.325.894	0	12.116.172.882	0	43,62	BAGIAN UMUM											
0.00.01.2.06.01		Penyediaan Komposisi Instansi Latrik/Keuangan Barang-baru Kantor	Jumlah komposisi Instansi Latrik yang disediakan (Sisuan, jenis - Kumulatif)	104	2.100.000.000	34	763.774.000	40	742.210.400	10	111.989.000	25	360.831.000	35	489.575.000	40	733.499.500	40	733.499.500	40	1.197.223.500	38,46	71,30	BAGIAN UMUM											
0.00.01.2.06.02		Penyediaan Perakatan dan Berlembaga Kantor	Berita Acara dan Berlembaga Kantor yang disediakan (Sisuan, Unit - Kumulatif)	14	2.694.238.415	7	109.908.800	7	637.135.400	0	0	0	0	0	0	0	636.866.840	7	636.866.840	7	746.715.640	50	27,72	BAGIAN UMUM											
0.00.01.2.06.03		Penyediaan Perakatan Rumah Tangga	Jumlah perakatan rumah tangga yang disediakan (Sisuan, jenis - Kumulatif)	151	2.047.220.500	50,02	407.061.200	64	633.220.500	15,99	59.564.900	31,98	252.678.100	47,97	480.824.600	64	630.659.600	64	630.659.600	64	1.037.920.700	39,75	50,70	BAGIAN UMUM											
0.00.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis dan jumlah barang logistik (Sisuan, jenis - Kumulatif)	629	4.660.000.000	209,01	1.345.556.672	210	1.146.500.000	54,99	286.574.400	109,98	572.168.150	144,97	857.430.250	220	1.146.492.250	220	1.146.492.250	220	2.492.042.922	34,98	51,92	BAGIAN UMUM											

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada tahun 2024 (Monev Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Laki (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang direvisasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2022 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab						
				5		6		7		8		9		10		11		12			13-14					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
0.00.01.2.14.03				151	5.376.250.000	56	501.974.512	76	1.890.539.500	12	49	76	76	76	76	76	76	50		BAGIAN KOMUNIKASI DAN PERHUBUNGAN						
			Jumlah Laporan Dibalok Audien dengan tokoh masyarakat/pemimpin/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan (Sabuan Dok - Kumulatif)	91	1.215.500.000	11	112.511.529	41	30.182.600	7	17	41	41	41	41	41	41	50		BAGIAN PROTOKOL DAN PERHUBUNGAN						
		Berdokumentasikan Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Berjamaah Bimoban (Sabuan Dok - Kumulatif)	700	3.300.000.000	312	260.613.798	350	782.937.280	61	91.080.756	214	290.013.572	350	462.872.708	350	774.948.944	350	1.035.562.742	50	31,38	BAGIAN KOMUNIKASI DAN PERHUBUNGAN				
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH			100	76.199.917.969	4	2.387.246.403	97	8.504.743.900	0	196.314.104	33.02	929.284.208	33.28	3.350.045.512	34.86	8.114.380.816	34.86	10.501.627.216	34,86	13,78	BAGIAN YESHA				
4.01.02	Meningkatnya Koordinasi Keagamaan		Presentase Kualitas Kehidupan Keagamaan (Sabuan, Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	80		0		85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah		Presentase Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan (Sabuan, Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	100		0		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah		Presentase Berhasilnya Pelaksanaan Kegiatan Bina Kemitrahan yang Diwujudkan Diakuram (Sabuan, Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	90	10.960.000.000	98,57	795.270.209	90	651.899.400	49,90	112.547.444	70,01	289.840.504	86,47	587.245.534	90	836.360.724	90	836.360.724	98,57	1.631.630.933	109,52	14,89	BAGIAN HUKUM		
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah		Presentase Peningkatan Nilai Layanan Kinerja (Sabuan, Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	70		70		72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			
			Presentase Pemenuhan Administrasi Tata Pemerintahan (Sabuan, Prosen - Kumulatif Meningkatkan)	400	9.509.440.230	100	738.852.219	100	1.199.392.500	6,35	112.110.772	97,22	390.300.847	100	559.052.521	100	1.170.390.795	100	1.170.390.795	100	1.170.390.795	100	1.909.243.041	25	20,08	BAGIAN PEMERINTAHAN
			Presentase basis wilayah administrasi antar desa (Sabuan, Prosen - Kumulatif Meningkatkan)	12,13		0		14,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Presentase basitasa pengelolaan kekayaan desa (Sabuan, Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	2,50		2		2,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80		
			Presentase Pelayanan Kemitrahan Temadap Kepala Daerah (Sabuan, Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	100		70		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70		

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra (Periode 2020-2024) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Kinerja Renstra s.d Renja Tln Lulu (n-2)		Target Kinerja dan Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD s.d Thn 2022 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab			
				5		6		7		8			9			10			11			12		13=6+12		14=13/5x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4.01.03.2.01.01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kegiatan pengalihan BUD dan BLUD	Jumlah Monitoring dan Evaluasi (Sajian Laporan - Kumulatif)	11	730.040.000	3	47.324.846	8	60.000.000	2	18.983.936	4	50.815.447	6	152.670.354	8	184.678.590	8	184.678.590	8	184.678.590	8	184.678.590	8	184.678.590	8	184.678.590	100	100%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
				9	547.500.000	4	35.493.632	4	36.696.000	2		3		3		4		4		4		4		4		4		30	30%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
4.01.03.2.01.02		Pengendalian dan Distribusi Perseorangan	Jumlah Dewan Pengawas dan Direksi BLUD yang terpilih (Sajian Orang - Nor Kumulatif)	2	547.500.000	3	35.493.632	2	69.300.000	0		0		2		2		2		2		2		2		2		100	100%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
				24	3.100.000.000	3	661.406.482	12	590.968.050	2	24.255.936	3	54.468.872	8	366.247.613	12	620.858.022	12	620.858.022	12	620.858.022	12	620.858.022	12	620.858.022	12	620.858.022	50	41,36%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
4.01.03.2.01.03		Perencanaan dan Penguasaan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah dokumen triwulan (Sajian Dok - Kumulatif)	8	381.000.000	1	73.489.609	4	39.696.000	1		1		2		4		4		4		4		4		4		50	50%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
				123	381.000.000	60	73.489.609	65	2.196.400	0		0		0		65		65		65		65		65		65		52	52%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
4.01.03.2.01.04		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kegiatan Pembentukan BLUD (Sajian Dok - Kumulatif)	Jumlah koordinasi yang aktif dalam program CSR atau TSLP (Sajian Peserta - Kumulatif)	12	797.500.000	5	19.881.728	4	118.073.150	0	11.942.736	0	34.002.107	1	55.904.963	4	109.548.419	4	109.548.419	4	109.548.419	4	109.548.419	4	109.548.419	4	109.548.419	33,33	16,23%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
				6	797.500.000	1	19.881.728	3	0	0		1		1		2		3		3		3		3		3		50	50%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
4.01.03.2.01.05		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kegiatan Pendirian BLUD	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kegiatan UMI (Sajian Laporan - Kumulatif)	1	300.000.000	0	0	1	87.215.500	0	7.068.000	1	25.798.941	1	62.114.144	1	74.788.894	1	74.788.894	1	74.788.894	1	74.788.894	1	74.788.894	1	74.788.894	100	24,93%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
				1	350.000.000	0	0	1	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%
4.01.03.2.02		Administrasi Pembangunan	Berkas Acara Revisi Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Pembangunan (Sajian BK - Kumulatif)	4	2.072.005.118	1	66.675.542	1	428.822.350	0	60.349.796	0	168.752.104	0	284.752.312	0	428.822.350	0	428.822.350	0	428.822.350	0	428.822.350	0	428.822.350	0	428.822.350	0	0	0%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
				4	747.675.050	0	5.031.000	2	125.637.400	0	17.868.056	0	38.790.671	1	103.502.468	2	125.552.144	2	125.552.144	2	125.552.144	2	125.552.144	2	125.552.144	2	125.552.144	50	17,47%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
4.01.03.2.02.02		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil sinergitas pengendalian (Sajian Laporan - Kumulatif)	2	110.000.000	0	603.451	1	40.331.400	0	10.036.668	0	25.012.136	1	84.621.104	1	84.621.104	1	84.621.104	1	84.621.104	1	84.621.104	1	84.621.104	1	84.621.104	50	77,78%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
				4	720.000.000	0	4.039.149	2	44.466.550	0	0	0	0	1		2		2		2		2		2		2		50	50%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Periode 2020-2024 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra 2022			Target Kinerja dan Anggaran PD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2022			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2022 (%)			Unit Kerja Penanggung Jawab			
				K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K	Rp	%				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
4.01.03.2.03.01		Pengelolaan Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan		12	494.330.068	5	57.001.842	4	217.965.000	0	32.444.892	1	104.948.096	2	133.630.800	4	217.751.404	4	217.751.404	4	217.751.404	4	217.751.404	4	217.751.404	4	217.751.404	4	217.751.404	33,33	55,58	BAGIAN ADMINISTRASI DAN PEMBANGUNAN		
4.01.03.2.03.03		Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan evaluasi kegiatan pembangunan (Skruan, Dok - Kumulatif)	4	4.010.333.746	1	189.562.036	1	1.024.038.275	0	437.167.239	0	443.394.035	0	1.011.548.539	0	1.011.548.539	0	1.011.548.539	0	1.011.548.539	0	1.011.548.539	0	1.011.548.539	0	1.011.548.539	0	1.011.548.539	0	41,41	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
4.01.03.2.03.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Hasil Pengadaan Barang / Jasa yang di finalisasi / (Skruan, Paket - Kumulatif)	4000	1.060.020.500	457	99.210.654	2000	369.342.700	265	29.814.440	641	79.310.039	944	201.210.779	2000	368.576.323	2000	368.576.323	2000	368.576.323	2000	368.576.323	2000	368.576.323	2000	368.576.323	2000	368.576.323	50	43,28	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
4.01.03.2.03.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah SKPD yang melaksanakan pelayanan pengadaan barang dan jasa elektronik. (Skruan, SKPD - Non Kumulatif)	73	806.656.360	73	98.466.740	73	318.750.525	73	51.687.640	73	166.503.430	73	279.254.170	73	317.863.214	73	317.863.214	73	317.863.214	73	317.863.214	73	317.863.214	73	317.863.214	73	317.863.214	100	46,65	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
4.01.03.2.03.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pemerta Sosialisasi Barang / Jasa (Skruan, Peserta - Kumulatif)	2100	1.500.613.862		28.619.249	1050	3.850.000	1050	44.787.608	1050	191.353.170	1050	262.923.086	1050	325.169.002	1050	325.169.002	1050	325.169.002	1050	325.169.002	1050	325.169.002	1050	325.169.002	1050	325.169.002	50	23,58	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
4.01.03.2.04		Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Jumlah SKPD yang di asistens dalam pengabdian SKPD - Non Kumulatif	73	643.037.084	0	12.265.393	73	332.095.050	73		73		73		73		73		73		73		73		73		73		100		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
4.01.03.2.04.01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Perikanan	Berita Acara Revisi (resensi) SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam, (Skruan, BA - Kumulatif)	4	1.459.225.000	1	73.669.750	1	202.185.200	0	24.736.056	0	64.740.472	0	146.173.368	0	198.112.548	0	198.112.548	0	198.112.548	0	198.112.548	0	198.112.548	0	198.112.548	0	466.035.098	0	31,53	BAGIAN REKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		
4.01.03.2.04.01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Perikanan	Jumlah koordinasi bidang keadilan dan perikanan. (Skruan, Laporan - Kumulatif)	12	463.175.000	4	27.457.250	6	32.375.000	0	13.682.368	1	39.971.336	3	70.879.854	6	93.619.876	6	93.619.876	6	93.619.876	6	93.619.876	6	93.619.876	6	93.619.876	6	121.077.126	50	26,14	BAGIAN REKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		
4.01.03.2.04.02		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan dan Lingkungan Hidup	Jumlah koordinasi bidang lingkungan hidup. (Skruan, Laporan - Kumulatif)	6	463.175.000	3	27.457.250	3	61.866.100	0		0		1		3		3		3		3		3		3		3		50		BAGIAN REKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		
4.01.03.2.04.02		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan dan Lingkungan Hidup	Jumlah koordinasi bidang lingkungan hidup. (Skruan, Laporan - Kumulatif)	7	532.975.000	4	38.755.250	3	108.424.100	0	11.003.668	0	24.760.136	2	75.243.504	3	104.312.072	3	104.312.072	3	104.312.072	3	104.312.072	3	104.312.072	3	104.312.072	3	122.267.922	42,86	23,13	BAGIAN REKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		
				Rata-rata capaian kinerja (%)			13,06	10,05	28,15	31,55	45,11	59,43	70,66	95,32																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka Peringkat Daerah berikutnya*1 :																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Rangka Peringkat Daerah berikutnya*1 :																																		

Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023, pencapaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD s.d Thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD s.d Thn 2023 (%)			Unit Kerja Penganggung Jawab						
					6			7			8			9			10			11			12			13=6+12			14=13/5x100%									
					K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp		K	Rp	
0.00.01.2.05.03		Pendataan dan Pengolahan dan Pengelolaan Administrasi Kependidikan, (Sistuan, Dokumen - Kumulatif)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kependidikan, (Sistuan, Dokumen - Kumulatif)	2	850.000.000	0	1	29.421.600	0	2.423.800	0	2.423.800	0	2.423.800	0	2.423.800	0	2.423.800	0	2.423.800	0	2.423.800	0	2.423.800	0	2.423.800	0	2.423.800	0	2.423.800	0	0	0	0	0	0	0,29	BAGIAN UMUM
0.00.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, (Sistuan, Orang - Kumulatif)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, (Sistuan, Orang - Kumulatif)	125	1.250.000.000	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM	
0.00.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja s.d kegiatan jaring kegiatan s.d kegiatan jaring Perangkat Daerah, (Sistuan, BA)	4	27.203.183.142	1	0	1	6.635.612.200	0	236.840.968	0	236.840.968	0	236.840.968	0	236.840.968	0	236.840.968	0	236.840.968	0	236.840.968	0	236.840.968	0	236.840.968	0	236.840.968	0	11.133.013.400	0	48.35	0	48.35	0		
0.00.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, (Sistuan, Paket - Kumulatif)	95	1.700.000.000	0	4	606.069.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM
0.00.01.2.06.02		Penyediaan Perakatan dan Perleengkapan Kantor	Jumlah Paket Perakatan dan Perleengkapan Kantor yang Disediakan, (Sistuan, Paket - Kumulatif)	19	3.260.052.642	0	1	515.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM
0.00.01.2.06.03		Penyediaan Perakatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perakatan Rumah Tangga yang Disediakan, (Sistuan, Paket - Kumulatif)	128	1.728.759.000	0	7	633.080.600	0,58	28.706.900	0,58	28.706.900	0,58	28.706.900	0,58	28.706.900	0,58	28.706.900	0,58	28.706.900	0,58	28.706.900	0,58	28.706.900	0,58	28.706.900	0,58	28.706.900	0,58	28.706.900	0,58	28.706.900	0,58	28.706.900	0,58	1,66	BAGIAN UMUM	
0.00.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, (Sistuan, Paket - Kumulatif)	520	4.700.000.000	0	12	1.718.888.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM
0.00.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang Disediakan, (Sistuan, Paket - Kumulatif)	85	2.768.932.000	0	16	446.091.300	1	10.301.500	1	10.301.500	1	10.301.500	1	10.301.500	1	10.301.500	1	10.301.500	1	10.301.500	1	10.301.500	1	10.301.500	1	10.301.500	1	10.301.500	1	10.301.500	1	1,18	0,37	BAGIAN UMUM		
0.00.01.2.06.07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, (Sistuan, Paket - Kumulatif)	130	2.644.064.000	0	4	663.422.500	0	37.439.100	0	37.439.100	0	37.439.100	0	37.439.100	0	37.439.100	0	37.439.100	0	37.439.100	0	37.439.100	0	37.439.100	0	37.439.100	0	37.439.100	0	37.439.100	0	1,12	0	1,12	BAGIAN UMUM	
0.00.01.2.06.08		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, (Sistuan, Laporan - Kumulatif)	530	5.238.242.000	0	260	1.071.000.000	21,67	88.463.000	21,67	88.463.000	21,67	88.463.000	21,67	88.463.000	21,67	88.463.000	21,67	88.463.000	21,67	88.463.000	21,67	88.463.000	21,67	88.463.000	21,67	88.463.000	21,67	88.463.000	21,67	88.463.000	21,67	4,09	1,69	BAGIAN UMUM		
0.00.01.2.06.09		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, (Sistuan, Laporan - Kumulatif)	1150	4.213.713.500	0	550	910.312.200	82	64.495.756	82	64.495.756	82	64.495.756	82	64.495.756	82	64.495.756	82	64.495.756	82	64.495.756	82	64.495.756	82	64.495.756	82	64.495.756	82	64.495.756	82	64.495.756	82	7,13	1,33	BAGIAN UMUM		
0.00.01.2.06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, (Sistuan, Dokumen - Kumulatif)	66	950.000.000	0	33	91.477.000	5	7.434.712	5	7.434.712	5	7.434.712	5	7.434.712	5	7.434.712	5	7.434.712	5	7.434.712	5	7.434.712	5	7.434.712	5	7.434.712	5	7.434.712	5	7.434.712	5	7,58	0,78	BAGIAN UMUM		
0.00.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (Sistuan, Bk)	4	38.187.741.676	1	0	484.875.000	0	40.232.000	0	40.232.000	0	40.232.000	0	40.232.000	0	40.232.000	0	40.232.000	0	40.232.000	0	40.232.000	0	40.232.000	0	40.232.000	0	40.232.000	0	40.232.000	0	2.596.251.100	0	6,80	0	
0.00.01.2.07.01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kumulatif	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan, (Sistuan, Unit - Kumulatif)	41	20.000.000.000	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM
0.00.01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Labangan Kumulatif	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Labangan yang Disediakan, (Sistuan, Unit - Kumulatif)	22	9.500.000.000	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang direvaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD s.d Thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD s.d Thn 2023 (%)			Unit Kerja Pelaksana di Tingkat Kabupaten				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I			II			III			IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K		Rp	K	Rp	
0.00.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan. (Satuan: Unit - Kumulatif)	144	3.925.201.000	0	77	179.833.000	3	44.760.000	3	44.760.000	3	44.760.000	3	44.760.000	3	44.760.000	3	44.760.000	3	44.760.000	3	44.760.000	3	44.760.000	3	44.760.000	2,08	1,14	BAGIAN UMUM				
0.00.01.2.07.06		Pengadaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perawatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan. (Satuan: Unit - Kumulatif)	75	2.674.218.202	0	9	76.344.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM			
0.00.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan. (Satuan: Unit - Kumulatif)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan. (Satuan: Unit - Kumulatif)	125	2.088.321.784	0	40	228.698.000	1	4.472.000	1	4.472.000	1	4.472.000	1	4.472.000	1	4.472.000	1	4.472.000	1	4.472.000	1	4.472.000	1	4.472.000	1	4.472.000	0,80	0,22	BAGIAN UMUM				
0.00.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. (Satuan: BA)	4	19.912.761.500	1	0	1	4.709.628.700	0	174.972.269	0	174.972.269	0	174.972.269	0	174.972.269	0	174.972.269	0	174.972.269	0	174.972.269	0	174.972.269	0	174.972.269	0	9.862.092.707	0	49,53				
0.00.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. (Satuan: Kumulatif)	7500	1.800.000.000	0	3500	504.998.200	383	37.598.608	383	37.598.608	383	37.598.608	383	37.598.608	383	37.598.608	383	37.598.608	383	37.598.608	383	37.598.608	383	37.598.608	383	37.598.608	5,11	2,09	BAGIAN UMUM				
0.00.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan. (Satuan: Laporan - Kumulatif)	8	6.316.701.000	0	4	1.375.939.100	0,33	129.136.861	0,33	129.136.861	0,33	129.136.861	0,33	129.136.861	0,33	129.136.861	0,33	129.136.861	0,33	129.136.861	0,33	129.136.861	0,33	129.136.861	0,33	129.136.861	4,13	2,04	BAGIAN UMUM				
0.00.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan. (Satuan: Laporan - Kumulatif)	16	3.296.060.500	0	12	248.691.400	1	8.236.800	1	8.236.800	1	8.236.800	1	8.236.800	1	8.236.800	1	8.236.800	1	8.236.800	1	8.236.800	1	8.236.800	1	8.236.800	6,25	0,25	BAGIAN UMUM				
0.00.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan. (Satuan: Laporan - Kumulatif)	10	8.500.000.000	0	2	2.580.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM		
0.00.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. (Satuan: BA)	4	19.310.729.000	1	90.750.000	4.431.449.590	0	206.542.036	0	206.542.036	0	206.542.036	0	206.542.036	0	206.542.036	0	206.542.036	0	206.542.036	0	206.542.036	0	206.542.036	0	11.140.676.808	0	59,39					
0.00.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya. (Satuan: Unit - Kumulatif)	60	4.110.729.000	0	54	1.065.888.000	4	48.579.304	4	48.579.304	4	48.579.304	4	48.579.304	4	48.579.304	4	48.579.304	4	48.579.304	4	48.579.304	4	48.579.304	4	48.579.304	6,67	1,18	BAGIAN UMUM				
0.00.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan. (Satuan: Unit - Kumulatif)	50	2.550.000.000	0	59	763.460.800	5	52.230.368	5	52.230.368	5	52.230.368	5	52.230.368	5	52.230.368	5	52.230.368	5	52.230.368	5	52.230.368	5	52.230.368	5	52.230.368	10	2,05	BAGIAN UMUM				
0.00.01.2.09.05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara. (Satuan: Unit - Kumulatif)	1400	1.100.000.000	350	92.000.000	350	92.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM	
0.00.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara. (Satuan: Unit - Kumulatif)	10	1.250.000.000	0	5	300.152.000	0	6.325.600	0	6.325.600	0	6.325.600	0	6.325.600	0	6.325.600	0	6.325.600	0	6.325.600	0	6.325.600	0	6.325.600	0	6.325.600	0	0,51	0	0	0	BAGIAN UMUM	
0.00.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi. (Satuan: Unit - Kumulatif)	6	2.800.000.000	0	2	281.398.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN UMUM

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra dan Kinerja Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)			Target Kinerja dan Kinerja Renja (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2023 (%)			Unit Kerja Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I			II			III			IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp
										8	9	10	11	12	13=6+12	14=13/5x100%																		
4.01.02.2.02.01		Facilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual. (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	19	31.527.942.869	0	0	9	10.335.676.500	0	135.126.668	0	135.126.668	0	135.126.668	0	135.126.668	0	135.126.668	0	135.126.668	0	135.126.668	0	135.126.668	0	135.126.668	0	135.126.668	0	0.43	BAGIAN KESRA		
4.01.02.2.02.02		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Perencanaan, Pengendalian Penduduk dan Kependudukan, Administrasi Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB. (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	90	16.000.000.000	0	0	8	346.497.200	0	25.002.256	0	25.002.256	0	25.002.256	0	25.002.256	0	25.002.256	0	25.002.256	0	25.002.256	0	25.002.256	0	25.002.256	0	0.16	BAGIAN KESRA				
4.01.02.2.02.03		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kependudukan, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Keasripan, Perantaraan, Kearsifan, Transhum Limmas, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	16	1.033.750.000	0	0	8	200.615.600	0	4.025.000	0	4.025.000	0	4.025.000	0	4.025.000	0	4.025.000	0	4.025.000	0	4.025.000	0	4.025.000	0	4.025.000	0	0.39	BAGIAN KESRA				
4.01.02.2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Berita Acara Revisi Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum. (Satuan: BA)	4	4.850.000.000	1	0	1	877.707.400	0	21.187.976	0	21.187.976	0	21.187.976	0	21.187.976	0	21.187.976	0	21.187.976	0	21.187.976	0	21.187.976	0	21.187.976	0	1.652.818.908	0	34.08			
4.01.02.2.03.01		Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun. (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	910	1.170.000.000	0	0	455	383.184.600	18	8.352.290	18	8.352.290	18	8.352.290	18	8.352.290	18	8.352.290	18	8.352.290	18	8.352.290	18	8.352.290	18	8.352.290	18	8.352.290	18	0.71	BAGIAN HUKUM		
4.01.02.2.03.02		Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum. (Satuan: Kasus - Kumulatif)	83	1.950.000.000	0	0	39	296.838.400	2	12.835.686	2	12.835.686	2	12.835.686	2	12.835.686	2	12.835.686	2	12.835.686	2	12.835.686	2	12.835.686	2	12.835.686	2	12.835.686	2	0.66	BAGIAN HUKUM		
4.01.02.2.03.03		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi. (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	412	1.730.000.000	0	0	206	197.668.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN HUKUM	
4.01.02.2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Berita Acara Revisi Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah. (Satuan: BA)	4	780.000.000	1	0	1	226.769.200	0	3.182.256	0	3.182.256	0	3.182.256	0	3.182.256	0	3.182.256	0	3.182.256	0	3.182.256	0	3.182.256	0	3.182.256	0	408.362.344	0	52.35			
4.01.02.2.04.01		Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri. (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	2	450.000.000	0	0	1	196.105.100	0	2.583.256	0	2.583.256	0	2.583.256	0	2.583.256	0	2.583.256	0	2.583.256	0	2.583.256	0	2.583.256	0	2.583.256	0	2.583.256	0	0.37	BAGIAN PEMERINTAHAN		
4.01.02.2.04.03		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama. (Satuan: Laporan - Kumulatif)	2	330.000.000	0	0	1	30.961.100	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	0.18	BAGIAN PEMERINTAHAN		
4.01.03	Meningkatnya Koordinasi Bidang Ekonomi	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dilaksanakan (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkat)	100	1.011.548.539	100	1.127.183.900	6,58	69.495.628	6,58	69.495.628	6,58	69.495.628	6,58	69.495.628	6,58	69.495.628	6,58	69.495.628	6,58	69.495.628	6,58	69.495.628	6,58	69.495.628	6,58	69.495.628	6,58	1.730.208.361	100	14.04	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
			Persentase kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang Dilaksanakan (Satuan: Persen - Non Kumulatif Meningkat)	80	6.449.267.670	55,56	425.258.479	60	475.909.100	0	11.324.536	0	11.324.536	0	11.324.536	0	11.324.536	0	11.324.536	0	11.324.536	0	11.324.536	0	11.324.536	0	11.324.536	0	604.545.190	69,45	9.37	BAGIAN ADMINISTRASI DAN PEMBANGUNAN		

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Tnn Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tnn berjalan (Tahun n-1) yang direvisasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tnn Pelaksanaan Renja PD Tnn 2023)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD s.d Tnn 2023 (%)			Unit Kerja Penanggung Jawab						
					5			6			7			8			9			10			11			12				13-6-12			14-13x100%		
					K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%		K	Rp	%	K	Rp	%
4.01.03.2.03.02		Pengembangan Layanan Pengabdian Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengabdian Secara Elektronik (Sajian - Dokumen - Kumulatif)	146	1.053.034.200	0	1	477.007.300	0	24.903.180	0	24.903.180	0	24.903.180	0	24.903.180	0	24.903.180	0	24.903.180	0	24.903.180	0	24.903.180	0	24.903.180	0	24.903.180	0	24.903.180	0	2.36	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
4.01.03.2.03.03		Bimbingan dan Advokasi Pengabdian Baring dan Jasa	Jumlah Orang yang Memiliki Persepsi Positif Terhadap Pengabdian Baring dan Jasa (Sabuan - Orang - Kumulatif)	2226	2.393.582.905	0	1040	318.727.200	200	32.422.768	200	32.422.768	200	32.422.768	200	32.422.768	200	32.422.768	200	32.422.768	200	32.422.768	200	32.422.768	200	32.422.768	200	32.422.768	200	32.422.768	200	1.35	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
4.01.03.2.04		Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Berita Acara Renja, Laporan SKPD, Laporan capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam. (Sabuan - BA)	4	1.466.600.000	1	1	229.578.900	0	7.256.512	0	7.256.512	0	7.256.512	0	7.256.512	0	7.256.512	0	7.256.512	0	7.256.512	0	7.256.512	0	7.256.512	0	467.291.610	0	26.43	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				
4.01.03.2.04.01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urutan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Kebijakan, Laporan, dan Tindak Lanjut (Sabuan - Dokumen - Kumulatif)	18	1.121.900.000	0	9	133.869.400	0	4.353.256	0	4.353.256	0	4.353.256	0	4.353.256	0	4.353.256	0	4.353.256	0	4.353.256	0	4.353.256	0	4.353.256	0	4.353.256	0	0.39	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM				
4.01.03.2.04.02		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urutan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Perencanaan, (Sabuan - Dokumen - Kumulatif)	6	644.700.000	0	3	95.709.500	0	2.903.256	0	2.903.256	0	2.903.256	0	2.903.256	0	2.903.256	0	2.903.256	0	2.903.256	0	2.903.256	0	2.903.256	0	2.903.256	0	0.45	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM				
Rata-rata capaian kinerja (%)										2,75	3,24	Sangat Rendah	2,75	3,24	Sangat Rendah	2,75	3,24	Sangat Rendah	2,75	3,24	Sangat Rendah	2,75	3,24	Sangat Rendah	2,75	3,24	Sangat Rendah	2,75	3,24	Sangat Rendah	2,75	3,24	Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya* :																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya* :																																			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya beberapa jenis Pelayanan yang diberikan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon diantaranya:

- a. Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan yang ditangani Sekretariat Daerah merupakan unit kerja penentu dalam menyusun dan merumuskan kebijakan pembangunan daerah, administrasi pemerintahan, kemasyarakatan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana/prasarana pemerintah daerah yang diimplementasikan ke dalam rencana strategis sekretariat daerah.
- b. Pelayanan sebagai koordinator pembangunan daerah Pelayanan sebagai koordinator perumusan kebijakan pembangunan daerah, Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai peran koordinatif yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.
- c. Pelayanan Administrasi Sekretariat Daerah melakukan kajian, telaahan, evaluasi kebijakan, serta penyediaan data dan informasi sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan pelayanan administratif kepada perangkat daerah dilingkup pemerintah daerah.

Hasil evaluasi kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon periode jangka menengah Renstra Tahun 2019-2024 dapat diketahui capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra tahun 2019-2024 menurut indikator kinerja pelayanan perangkat daerah dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3

Hasil Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

No	Sasaran	Target NSPK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun						
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tahun 2019 Meningkatnya kualitas kehidupan keagamaan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Meningkatnya kualitas kehidupan keagamaan		Cakupan angka melek Al-Qur'an	Orang/ Lem	300	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
			Cakupan angka budaya mengaji ba'da magrib	Orang/ DKM	309	-	-	-	-	-	309	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
			Cakupan angka partisipasi masyarakat dalam lembaga keagamaan dalam pengembangan keagamaan	Kegiatan	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
			Cakupan angka hafal Al-Qur'an, qasidah, cerdas cermat, sholat, kaligrafi, pidlaci dan pidato	Orang	390	-	-	-	-	-	390	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
2	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat akibat terjadinya resiko sosial		Cakupan angka tempat ibadah yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan menerima hibah dan bantuan sosial arana prasarana keagamaan	Laporan	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
			Cakupan angka penyampaian laporan atas penggunaan hibah dan bantuan sosial	Laporan	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya Konsistensi Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang telah dikelola dengan tertib dan transparan	Dok	430	-	-	-	-	-	430	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
			Jumlah rancangan produk hukum daerah yang telah difasilitasi menjadi produk hukum daerah	Perda/Perkada	417	-	-	-	-	-	417	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya penanganan sengketa/perkara/permasalahan hukum dan penerapan nilai-nilai HAM		Cakupan angka penyelesaian perkara/sengketa pemerintahan daerah	Perkara	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Target NSPK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun						
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Tahun 2019																						
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dan pemerintahan desa/kelurahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme		Cakupan angka kemampuan aparatur desa/kelurahan dalam mengelola keuangan desa/kelurahan	Dok	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
			Cakupan angka pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Dok	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
			Cakupan angka penyelesaian tapal batas wilayah administrasi	Dok	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
6	Meningkatnya pelayanan data/informasi kehumasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah peliputan, penyajian data dan informasi kegiatan pemerintahan dalam pembangunan dan masyarakat	Liputan	350	-	-	-	-	-	350	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
			Meningkatkan kemampuan/kapasitas akses internet dan jaringan komunikasi/informasi	Paket	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
			Cakupan angka pemberitaan daerah pada media massa yang adil dan seimbang	Kali	47	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
7	Meningkatnya kemampuan dan daya saing koperasi dan UMKM		Cakupan angka kapasitas dan daya saing koperasi dan UMKM	UMKM	36	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
			Jumlah kajian bidang perekonomian dan usaha perdagangan	Dok	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
8	Terwujudnya keserasian dan keselarasan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang perekonomian sektor BUMD		Cakupan angka inflasi	Dok	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Kajian dan Kebijakan di bidang perusahaan daerah	Dok	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
			Cakupan angka penyampaian laporan atas pengelolaan keuangan daerah	Dok	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
			Cakupan angka pemanfaatan dana CSR BPR	Dok	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
			Cakupan pendapatan BUMD	Dok	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
9	Meningkatnya pengelolaan data/informasi pembangunan		Jumlah kajian bidang pembangunan	Buku	600	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
			Jumlah pekerjaan yang dilelangkan	SKPD	72	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
			Cakupan pengendalian lalu lintas angkutan	%	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Target NSPK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun						
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Tahun 2019																						
10	Meningkatnya perbaikan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam		Jumlah kajian bidang LH dan Sumber Daya Alam Cakupan angka rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Dok Orang/M2	1 350	-	-	-	-	-	1 350	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
11	Meningkatnya efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan		Jumlah kajian bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan	Dok	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
12	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah penerapan SOP, IKM, SP dan SPM persatuan objek pelayanan pada SKPD	OPD	72	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
13	Meningkatnya sistem perencanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja		Jumlah minat baca aparatur Cakupan angka kedisiplinan aparatur	Buku Kali	65 5	-	-	-	-	-	65 5	-	-	-	-	-	100 100	-	-	-	-	-	-
14	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah		Jumlah dokumen perencanaan skpd Cakupan angka penyampaian laporan atas pengelolaan keuangan daerah	Dok Laporan	1 1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	100 100	-	-	-	-	-	-
15	Meningkatnya kemampuan pengelolaan asset daerah		Cakupan asset tanah Pemda yang memiliki dokumen sertifikasi Jumlah penyampaian laporan atas pengelolaan asset dan barang daerah	Kasus Dok	3 1	-	-	-	-	-	3 1	-	-	-	-	-	100 100	-	-	-	-	-	-
16	Meningkatnya pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, dan kapasitas sumber daya aparatur		Adanya ketersediaan administrasi perkantoran sarana dan prasarana perkantoran serta perjalanan dinas luar daerah	%	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Meningkatnya pelayanan kedinmas Kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan		Jumlah pelaksanaan rapat kerja muspida dan pejabat pemda	%	90	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Target NSPK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun							
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Tahun 2020 s.d. 2024																					
1	Meningkatnya koordinasi bidang Pendidikan		Prosentase tingkat ketercapaian target RLS	persen	-	98	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
			Prosentase Evaluasi Kebijakan dalam Peningkatan Tingkat dan Ketercapaian Target RLS	persen	-	-	80	82	84	86	-	-	80	-	-	-	-	-	-	100	100	-
2	Meningkatnya koordinasi bidang kesehatan		Prosentase ketercapaian angka harapan hidup	persen	-	98	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
			Prosentase Evaluasi Kebijakan dalam Ketercapaian AHH	persen	-	-	80	82	84	86	-	-	80	-	-	-	-	-	-	100	100	-
3	Meningkatnya koordinasi bidang ekonomi		Prosentase peningkatan pendapatan masyarakat	persen	-	98	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
			Prosentase Kebijakan dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat	persen	-	-	80	83	86	89	-	-	80	-	-	-	-	-	-	100	100	-
4	Meningkatnya koordinasi keagamaan		Prosentase peningkatan koordinasi dalam menurunkan angka friksi antar dan internal umat beragama	persen	-	95	95	96	97	98	-	95	95	-	-	-	-	100	100	100	-	-
5	Meningkatnya koordinasi penurunan pekat		Prosentase penurunan penyakit masyarakat	persen	-	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
			Prosentase Peningkatan Koordinasi dalam menurunkan Angka Penyakit Masyarakat	persen	-	-	81	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	100	100	-
6	Meningkatnya implementasi jumlah kebijakan pemerintah daerah		Prosentase jumlah perda dan perkara yang diimplementasikan	persen	-	60	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
			Prosentase Jumlah Perda dan Perkada yang dievaluasi	persen	-	-	62	65	68	70	-	-	62	-	-	-	-	-	-	100	100	-
7	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara pemerintah daerah		Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	laporan	-	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	100	100	100	-	-
8	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan daerah		Indeks kepuasan masyarakat	point	-	3,26	3,30	3,35	3,40	3,50	-	3,26	3,30	-	-	-	-	100	100	100	-	-

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Salah satu isu yang sangat mendasar dan sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon adalah adanya rencana perubahan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon sesuai Permendagri 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan adanya perombakan struktur organisasi yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dapat berpengaruh pada keberlangsungan pelaksanaan pemerintahan, mengingat hal tersebut membutuhkan proses serta penyesuaian, baik dari segi pekerjaan, anggaran maupun sumber daya manusia. Namun begitu, kegiatan perencanaan pembangunan khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon tetap diupayakan seoptimal mungkin.

Untuk memudahkan dalam memberikan gambaran tentang isu strategis yang dikaitkan dengan telaah terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka dapat digambarkan kerangka permasalahan Sekretariat Daerah.

Tabel 2.4
Pemetaan Permasalahan
untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan fasilitas dan koordinasi dalam menghasilkan rumusan kebijakan umum yang berkualitas dan akuntabel	Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan daerah	Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan
		Belum optimalnya penguatan akuntabilitas kinerja	Belum optimalnya sistem pelaporan kinerja
		Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya fungsi koordinasi
		Belum optimalnya pengendalian pembangunan	Belum optimalnya evaluasi program pembangunan
		Belum optimalnya pelayanan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Belum optimalnya pemahaman para pelaku pengadaan barang dan jasa
		Belum optimalnya penataan produk hukum dan meningkatkan budaya taat hukum	Belum optimalnya pengetahuan tentang produk hukum daerah
		Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kerjasama daerah
		Belum optimalnya penataan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Belum optimalnya penyampaian laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari perangkat daerah
		Belum optimalnya evaluasi produk hukum daerah	Belum optimalnya evaluasi terhadap produk hukum daerah yang telah ditetapkan
		Belum optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah	Belum optimalnya perampingan kelembagaan dengan peningkatan fungsi perangkat daerah
		Belum optimalnya ketatalaksanaan perangkat daerah	Belum optimalnya pengukuran tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah
		Belum optimalnya penataan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat	Belum optimalnya informasi dan data program bantuan yang dapat diampu oleh masyarakat

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari dokumen lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Sekretariat Daerah, sebagai berikut:

1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan Daerah;
2. Efektifitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan;
3. Penataan Ketatalaksanaan;
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
6. Optimalisasi Pengendalian Pembangunan;
7. Optimalisasi Pelayanan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
8. Penataan produk hukum dan meningkatkan budaya taat hukum;
9. Optimalisasi Penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah;
10. Belum optimalnya optimalisasi evaluasi produk hukum daerah;
11. Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
12. Belum Optimalnya penataan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat;
13. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan akhir RKPD dilakukan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari hasil pencermatan internal ada perbedaan antara jumlah anggaran yang diusulkan dengan jumlah anggaran pada rancangan RKPD Tahun 2024. Tetapi masih dimungkinkan ada pergeseran anggaran antar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan pada bidang terlampir:

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024

BAGIAN UMUM

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator Kinerja (4)	Capaian Target Pagu Indikatif (Rp) (5)	No. (1)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator Kinerja (4)	Capaian Target Pagu Indikatif (Rp) (6)
(1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Peningkatan prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Prosen		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Peningkatan prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Prosen
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 BA		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 BA
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Setda	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Setda	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Setda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Setda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 BA		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 BA
3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Setda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7 Paket	3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Setda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7 Paket
4	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Setda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	4	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Setda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Setda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Setda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 BA		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 BA
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Setda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Setda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Setda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	64 Paket	8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Setda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Setda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	270 Paket	9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Setda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Setda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	45 Paket	10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Setda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket
11	Penyediaan Bahan/Material	Setda	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	65 Paket	11	Penyediaan Bahan/Material	Setda	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket
12	Fasilitas Kunjungan Tamu	Setda	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	270 Laporan	12	Fasilitas Kunjungan Tamu	Setda	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	260 Laporan

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)	No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Setda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	1.858.135.600,00	13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Setda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550 Laporan	1.858.000.000,00
14	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Setda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	33 Dokumen	600.000.000,00	14	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Setda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	33 Dokumen	175.733.000,00
15	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Setda	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 BA	12.000.000.000,00	15	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Setda	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 BA	-
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Setda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit	5.000.000.000,00	16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Setda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-
17	Pengadaan Mebel	Setda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	72 Unit	3.000.000.000,00	17	Pengadaan Mebel	Setda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	77 Unit	197.816.300,00
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Setda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	2.000.000.000,00	18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Setda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	83.978.400,00
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	65 Unit	1.093.882.800,00	19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit	251.567.800,00
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Setda	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 BA	950.000.000,00	20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Setda	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 BA	844.332.400,00
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Setda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	3.308.748.000,00	21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Setda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1.687.068.112,00
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	1.726.523.500,00	22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	329.417.990,00
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Setda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	4.500.000.000,00	23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Setda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	3.184.200.000,00
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Setda	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 BA	2.153.239.000,00	24	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Setda	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 BA	1.172.476.800,00
25	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Setda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	1.350.000.000,00	25	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Setda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	59 Unit	839.806.880,00
26	Pemeliharaan Mebel	Setda	Jumlah Mebel yang Dipelihara	350 Unit	350.000.000,00	26	Pemeliharaan Mebel	Setda	Jumlah Mebel yang Dipelihara	350 Unit	101.200.000,00
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Setda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	650.000.000,00	27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Setda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	330.167.200,00
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Setda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	3 Unit	1.400.000.000,00	28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Setda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	2 Unit	358.450.380,00

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Barge	Pagu Indikatif (Rp)	No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Barge	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	2.500.000.000,00	27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1.535.516.000,00
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1.500.000.000,00	28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	656.908.000,00
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 BA			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 BA	
31	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	402.268.000,00	29	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	238.080.000,00
				JUMLAH	62.342.209.552,00					JUMLAH	21.563.522.612,00

BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No.	Rancangan Awal RKPD			No.	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Transparan, Akuntabel dan Informatif		PRO GRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Transparan, Akuntabel dan Informatif	100 Prosen	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 BA	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Setda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Setda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	100.000.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Setda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Setda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	100.000.000,00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	40.000.000,00
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi keuangan Perangkat Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 BA	
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Setda	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Setda	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	176.669.559,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Setda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Setda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	97.209.450,00
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	242.084.200,00
				Jumlah		Jumlah			755.963.209,00
				Jumlah		Jumlah			755.800.000,00

BAGIAN ORGANISASI

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)	No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Rancangan Produk Hukum Bidang Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100 Prosen			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Rancangan Produk Hukum Bidang Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100 Prosen	
			Prosentase Peningkatan Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	75 Prosen					Prosentase Peningkatan Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	75 Prosen	
			Prosentase Jumlah Rancangan Produk Hukum tentang Kelembagaan dan Organisasi Daerah	100 Prosen					Prosentase Jumlah Rancangan Produk Hukum tentang Kelembagaan dan Organisasi Daerah	100 Prosen	
	Penataan Organisasi		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penataan Organisasi	1 BA			Penataan Organisasi		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penataan Organisasi	1 BA	
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Setda	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	712.086.800,00	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Setda	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	339.285.700,00
2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Setda	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	475.893.810,00	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Setda	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	135.714.300,00
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Setda	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	625.000.000,00	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Setda	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	250.000.000,00
4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Setda	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	350.000.000,00	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Setda	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	169.642.850,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Setda	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	300.000.000,00	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Setda	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	200.000.000,00
JUMLAH						JUMLAH					
2.462.980.610,00						1.094.642.850,00					

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)	No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Pelayanan Kedinasan Terhadap Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	100 Prosen			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Pelayanan Kedinasan Terhadap Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	100 Prosen	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1 BA			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1 BA	
1	Fasilitasi Keprotokolan	Setda	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	731 Laporan	3.450.064.300,00	1	Fasilitasi Keprotokolan	Setda	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	675 Laporan	2.931.769.500,00
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Setda	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	153 Laporan	6.800.000.000,00	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Setda	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	135 Laporan	5.423.683.300,00
3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Setda	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	350 Laporan	2.200.000.000,00	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Setda	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	325 Laporan	1.007.092.300,00
JUMLAH						JUMLAH					
12.450.064.300,00						9.362.545.100,00					

BAGIAN PEMERINTAHAN

Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Prosentase Pemenuhan Administrasi Tata Pemerintahan	100 Prosen	
	Administrasi Tata Pemerintahan		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	1 BA	
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	90.800.000,00
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	7 Dokumen	500.000.000,00
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	1.050.000.000,00
	Fasilitasi Kerjasama Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	1 BA	
4	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	250.000.000,00
5	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Setda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	170.000.000,00
				JUMLAH	2.770.000.000,00

BAGIAN HUKUM

Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Prosentase Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan	90 Prosen	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1 BA	
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Setda	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	455 Dokumen	600.000.000,00
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Setda	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	44 Kasus	1.000.000.000,00
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Setda	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	206 Dokumen	900.000.000,00
				JUMLAH	2.500.000.000,00

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)	No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PEMBRINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Prosentase Koordinasi yang Dilakukan Di Bagian Kesejahteraan Rakyat	100 Persen			PROGRAM PEMBRINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Prosentase Koordinasi yang Dilakukan Di Bagian Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	
			Prosentase Monev yang Dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat	90 Prosen					Prosentase Monev yang Dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	
			Prosentase Kualitas Kehidupan Keagamaan Yang Ditingkatkan Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	99 Prosen 1 BA			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Setda	Prosentase Kualitas Kehidupan Keagamaan Yang Ditingkatkan Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen 1 BA	
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9 Dokumen	16.529.827.218,00	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9 Dokumen	3.500.000.000,00
2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja T erkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	45 Dokumen	9.000.000.000,00	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	45 Dokumen	3.500.000.000,00
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja T erkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	8 Dokumen	703.750.000,00	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	8 Dokumen	500.000.000,00
				JUMLAH	26.233.577.218,00				JUMLAH	7.500.000.000,00	

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)	No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Prosentase Koordinasi dalam Meningkatkan Perekonomian	100 Prosen			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Prosentase Koordinasi dalam Meningkatkan Perekonomian	100 Prosen		
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1 BA					Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1 BA		
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	21 Dokumen	1.070.000.000,00	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	21 Dokumen	457.199.700,00	
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Setda	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	91 Laporan	1.950.000.000,00	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Setda	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	91 Laporan	387.300.000,00	
3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	7 Dokumen	965.000.000,00	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	7 Dokumen	136.000.000,00	
	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	1 BA			Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	1 BA		
6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	9 Dokumen	587.650.000,00	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	9 Dokumen	210.000.000,00	
7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3 Dokumen	337.700.000,00	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3 Dokumen	195.000.000,00	
					JUMLAH							JUMLAH
					5.960.350.000,00							1.385.499.700,00

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)	No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Prosentase kebijakan Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan	80 Prosen			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Prosentase kebijakan Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan	80 Prosen	
	Administrasi Pembangunan		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Pembangunan	1 BA			Administrasi Pembangunan		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Pembangunan	1 BA	
1	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	800.000.000,00	1	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	138.500.000,00
2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Setda	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3 Laporan	530.000.000,00	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Setda	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3 Laporan	105.000.000,00
3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Setda	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	312.677.295,00	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Setda	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	312.677.295,00
				JUMLAH	1.642.677.295,00					JUMLAH	556.177.295,00

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)	No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Prosentase Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berkualitas	100 Prosen			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Prosentase Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berkualitas	100 Prosen	
	Pengadaan Barang dan Jasa		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	1 BA			Pengadaan Barang dan Jasa		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	1 BA	
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.000 Dokumen	671.828.300,00	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	671.828.300,00
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	73 Dokumen	547.885.500,00	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	547.885.500,00
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Setda	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.123 Orang	1.258.543.426,00	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Setda	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.050 Orang	1.258.543.426,00
				JUMLAH	2.478.257.226,00					JUMLAH	2.478.257.226,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah tidak ada yang berkaitan langsung dengan masyarakat karena Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah tidak ada yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, melainkan Sekretariat Daerah mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Hasil pelaksanaan Musrenbang, tidak ada program/kegiatan yang diusulkan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Sekretariat Daerah, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: *“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”*, pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi: 1. Industri 2. Pariwisata 3. Ketahanan Pangan 4. UMKM 5. Infrastruktur 6. Transformasi Digital 7. Pembangunan Rendah Karbon 8. Reformasi Perlindungan Sosial 9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan 10. Reformasi Kesehatan.

Adapun 7 prioritas pembangunan nasional tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun tema pembangunan Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon adalah *“Peningkatan Nilai Tambah Dan Daya Saing Komoditi Unggul Yang Didukung Oleh Pembangunan Sdm Unggul Serta Layanan Dan Kebijakan Publik Yang Berorientasi Kepada Masyarakat”* dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses, kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan pendidikan dasar;

2. Perluasan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik bersifat preventif maupun kuratif berbasis masyarakat;
3. Penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan layanan dasar, kelancaran kegiatan ekonomi, daerah perbatasan dan rawan bencana;
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang berbasis inovasi;
5. Penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial;
6. Perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan penguatan jiwa kewirausahaan;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang guna mendukung sinergitas wilayah dan keberlanjutan pembangunan;
8. Reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima; dan
9. Peningkatan kondusifitas kehidupan bermasyarakat dalam interaksi sosial dan kehidupan beragama.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Berpedoman pada tujuan dalam Renstra Sekretariat Daerah, maka tujuan Renja Sekretariat Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran dan fungsi koordinasi dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan antar dan inter umat beragama;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah.

Penjabaran tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun ke-					Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Akhir Renstra
		Semula	Menjadi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Peran dan Fungsi Koordinasi Dalam Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat		Prosentase ketercapaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Prosentase ketercapaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-	98%	98%	99%	99%	100%
	Meningkatnya Koordinasi Bidang Pendidikan	Prosentase Tingkat Ketercapaian Target RLS	Prosentase Evaluasi Kebijakan dalam Peningkatan Tingkat dan Ketercapaian Target RLS	-	98%	80%	82%	84%	86%
	Meningkatnya Koordinasi Bidang Kesehatan	Prosentase Ketercapaian Angka Harapan Hidup	Prosentase Evaluasi Kebijakan dalam Ketercapaian AHH	-	98%	80%	82%	84%	86%
	Meningkatnya Koordinasi Bidang Ekonomi	Prosentase Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Prosentase Kebijakan dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat	-	98%	80%	83%	86%	89%
Meningkatkan Koordinasi dan Pembinaan Antar dan Internal umat beragama		Prosentase ketercapaian Indeks Kerukunan Umat beragama (KUB)	Prosentase ketercapaian Indeks Kerukunan Umat beragama (KUB)	-	98%	98%	99%	99%	100%
	Meningkatnya Koordinasi Keagamaan	Prosentase Peningkatan Koordinasi dalam menurunkan Angka Friksi Antar dan Internal Umat Beragama	Prosentase Peningkatan Koordinasi dalam menurunkan Angka Friksi Antar dan Internal Umat Beragama	-	95%	95%	96%	97%	98%
	Meningkatnya Koordinasi Penurunan Pekat	Prosentase Penurunan Penyakit Masyarakat	Prosentase Peningkatan Koordinasi dalam menurunkan Angka Penyakit Masyarakat	-	80%	81%	-	-	-
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	65 poin	68 poin	70 poin	73 poin	79 poin	80 poin
	Meningkatnya Implementasi Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah yang Diimplementasikan	Prosentase Jumlah Perda dan Perkada yang Diimplementasikan	Prosentase Jumlah Perda dan Perkada yang dievaluasi	-	60%	62%	65%	68%	70%
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	3.26 poin	3.30 poin	3.35 poin	3.40 poin	3.50 poin

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadikan bahan pertimbangan perangkat daerah dalam merumuskan program dan kegiatan adalah :

1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Pencapaian program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Cirebon terpilih, sehingga program dan kegiatan dalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati Cirebon yaitu pada :

- Misi ke-2 : “Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.”
- Misi ke-3 : “Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika.”
- Misi ke-4 : “Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.”

2) Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan oleh Sekretariat Daerah. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun anggaran 2024 yang

akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

3.3.2 Uraian Garis Besar mengenai Program dan Kegiatan

a. Jumlah program dan jumlah kegiatan

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Sekretariat Daerah Tahun 2024.

b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Sekretariat Daerah sifat penyebarannya diseluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan
Kebutuhan dana/pagu indikatif hanya bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon mengampu unsur pendukung urusan pemerintahan. Program-program Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 mendukung prioritas pembangunan “Reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima” sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024. Adapun rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025



**DRAFT RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

SKPD: 4-1.0-0.0-0.01. SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.	NON URUSAN				59.478.851.160				104.713.558.269
0.00.	NON BIDANG URUSAN				59.478.851.160				104.713.558.269
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100 Prosen	21.563.522.612			100 Prosen	62.342.209.552
		Prosentase Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Transparan, Akuntabel dan Informatif		100 Prosen	27.458.140.598			100 Prosen	27.458.303.807
		Prosentase Rancangan Produk Hukum Bidang Pelayanan Publik dan Tata Laksana		100 Prosen	305.357.150			100 Prosen	825.893.810
		Prosentase Pelayanan Kedinasian Terhadap Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah		100 Prosen	9.362.545.100			100 Prosen	12.450.064.300
		Prosentase Peningkatan Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)		75 Prosen	450.000.000			75 Prosen	925.000.000
		Prosentase Jumlah Rancangan Produk Hukum tentang Kelembagaan dan Organisasi Daerah		100 Prosen	339.285.700			100 Prosen	712.086.800
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 BA	240.000.000	PIS		1 BA	240.000.000
0.00.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	8 Dokumen	100.000.000	PIS		10 Dokumen	100.000.000
0.00.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	4 Laporan	100.000.000	PIS		4 Laporan	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
0.00.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Laporan	40.000.000	PIS	1 Laporan	40.000.000		
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1 BA	24.748.856.598	PIS	1 BA	24.749.019.807		
0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kabupaten Cirebon	133 Orang/Bulan	24.233.056.598	PIS	133 Orang/Bulan	24.233.056.598		
0.00.01.2.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Dokumen	176.600.000	PIS	1 Dokumen	176.669.559		
0.00.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Laporan	97.200.000	PIS	1 Laporan	97.209.450		
0.00.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	6 Laporan	242.000.000	PIS	6 Laporan	242.084.200		
0.00.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1 BA	349.122.400	PIS	1 BA	2.316.982.530		
0.00.01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	2 Dokumen	259.842.000	PIS	2 Dokumen	2.176.982.530		
0.00.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Laporan	89.280.400	PIS	1 Laporan	140.000.000		
0.00.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1 BA	1.147.525.500	PIS	1 BA	2.090.327.500		
0.00.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Kabupaten Cirebon	7 Paket	663.682.300	PIS	7 Paket	840.327.500		
0.00.01.2.05.03.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Dokumen	183.843.200	PIS	1 Dokumen	500.000.000		

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025				
			(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	60 Orang	300.000.000	PIS		75 Orang	750.000.000
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					1 BA	8.255.888.450	PIS		1 BA	14.050.238.222
0.00.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	4 Paket	666.697.700	PIS		50 Paket	900.000.000
0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Paket	566.775.000	PIS		10 Paket	1.707.646.622
0.00.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				BAGIAN UMUM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	7 Paket	700.000.000	PIS		64 Paket	905.540.000
0.00.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	12 Paket	1.890.117.570	PIS		270 Paket	2.500.000.000
0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				BAGIAN UMUM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	16 Paket	490.700.430	PIS		45 Paket	1.450.089.000
0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				BAGIAN UMUM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	4 Paket	729.764.750	PIS		65 Paket	1.384.986.000
0.00.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				BAGIAN UMUM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	260 Laporan	1.178.100.000	PIS		270 Laporan	2.743.841.000
0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				BAGIAN UMUM (- Kecamatan sumber)	550 Laporan	1.858.000.000	PIS		600 Laporan	1.858.135.600
0.00.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	33 Dokumen	175.733.000	PIS		33 Dokumen	600.000.000
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1 BA	533.362.500	PIS		1 BA	23.093.882.800
0.00.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	0 Unit	-			24 Unit	12.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	0 Unit				12 Unit	5.000.000.000
0.00.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	77 Unit	197.816.300	PIS		72 Unit	3.000.000.000
0.00.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	9 Unit	83.978.400	PIS		40 Unit	2.000.000.000
0.00.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	40 Unit	251.567.800	PIS		65 Unit	1.093.882.800
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 BA	6.045.018.502	PIS		1 BA	10.485.271.500
0.00.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3.500 Laporan	844.332.400	PIS		4.000 Laporan	950.000.000
0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BAGIAN UMUM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	4 Laporan	1.687.068.112	PIS		4 Laporan	3.308.748.000
0.00.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAGIAN UMUM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	12 Laporan	329.417.990	PIS		8 Laporan	1.726.523.500
0.00.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	2 Laporan	3.184.200.000	PIS		5 Laporan	4.500.000.000
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 BA	4.994.525.260	PIS		1 BA	9.903.239.000
0.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BAGIAN UMUM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	54 Unit	1.172.476.800	PIS		30 Unit	2.153.239.000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			59 Unit	839.806.880	PIS	25 Unit	1.350.000.000		
0.00.01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara			350 Unit	101.200.000	PIS	350 Unit	350.000.000		
0.00.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5 Unit	330.167.200	PIS	5 Unit	650.000.000		
0.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	358.450.380	PIS	3 Unit	1.400.000.000		
0.00.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			6 Unit	1.535.516.000	PIS	10 Unit	2.500.000.000		
0.00.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	656.908.000	PIS	10 Unit	1.500.000.000		
0.00.01.2.11.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1 BA	2.707.364.000	PIS	1 BA	2.871.552.000		
0.00.01.2.11.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bulan	1.330.147.000	PIS	2 Orang/Bulan	1.330.147.000		
0.00.01.2.11.02.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			2 Paket	238.080.000	PIS	2 Paket	402.268.000		
0.00.01.2.11.04.	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bulan	1.139.137.000	PIS	2 Orang/Bulan	1.139.137.000		
0.00.01.2.13.	Penataan Organisasi	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penataan Organisasi			1 BA	1.094.642.850	PIS	1 BA	2.462.980.610		
0.00.01.2.13.01.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			4 Dokumen	339.285.700	PIS	4 Dokumen	712.086.800		
0.00.01.2.13.02.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1 Laporan	135.714.300	PIS	1 Laporan	475.893.810		

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025				
			(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00.01.2.13.03.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	skpd dan kecamatan (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	2 Dokumen	250.000.000	PIS		1 Dokumen	625.000.000		1 Dokumen	625.000.000
0.00.01.2.13.04.	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Dokumen	169.642.850	PIS		1 Dokumen	350.000.000		1 Dokumen	350.000.000
0.00.01.2.13.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Dokumen	200.000.000	PIS		1 Dokumen	300.000.000		1 Dokumen	300.000.000
0.00.01.2.14.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		1 BA	9.362.545.100	PIS		1 BA	12.450.064.300		1 BA	12.450.064.300
0.00.01.2.14.01.	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	675 Laporan	2.931.769.500	PIS		731 Laporan	3.450.064.300		731 Laporan	3.450.064.300
0.00.01.2.14.02.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	135 Laporan	5.423.683.300	PIS		153 Laporan	6.800.000.000		153 Laporan	6.800.000.000
0.00.01.2.14.03.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	325 Laporan	1.007.092.300	PIS		350 Laporan	2.200.000.000		350 Laporan	2.200.000.000
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				14.226.356.926				41.584.861.739			41.584.861.739
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH				14.226.356.926				41.584.861.739			41.584.861.739
4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase Koordinasi yang Dilakukan Di Bagian Kesejahteraan Rakyat		100 Persen	500.000.000			100 Persen	703.750.000		100 Persen	703.750.000
		Prosentase Money yang Dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat		100 Prosen	3.500.000.000			100 Prosen	9.000.000.000		100 Prosen	9.000.000.000
		Prosentase Kualitas Kehidupan Keagamaan Yang Ditingkatkan		100 Prosen	3.500.000.000			100 Prosen	16.529.827.218		100 Prosen	16.529.827.218
		Prosentase Peraturan Perundang - undangan yang ditetapkan		90 Prosen	1.400.000.000			90 Prosen	2.500.000.000		90 Prosen	2.500.000.000
		Prosentase Pemenuhan Administrasi Tata Pemerintahan		100 Prosen	979.100.000			100 Prosen	2.770.000.000		100 Prosen	2.770.000.000
4.01.02.2.01.	Administrasi Tata Pemerintahan	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		1 BA	729.500.000	PIS		1 BA	2.350.000.000		1 BA	2.350.000.000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
4.01.02.2.01.01.	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kabupaten Cirebon ; Bagian Pemerintahan, Setda Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Dokumen	90.800.000	PIS		1 Dokumen	800.000.000		
4.01.02.2.01.02.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bagian Pemerintahan, Setda Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	5 Dokumen	286.100.000	PIS		7 Dokumen	500.000.000		
4.01.02.2.01.03.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	- ; Bagian Pemerintahan (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	4 Dokumen	352.600.000	PIS		4 Dokumen	1.050.000.000		
4.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		1 BA	7.500.000.000	PIS		1 BA	26.233.577.218		
4.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kabupaten Cirebon	9 Dokumen	3.500.000.000	PIS		9 Dokumen	16.529.827.218		
4.01.02.2.02.02.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kabupaten Cirebon	45 Dokumen	3.500.000.000	PIS		45 Dokumen	9.000.000.000		
4.01.02.2.02.03.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kabupaten Cirebon	8 Dokumen	500.000.000	PIS		8 Dokumen	703.750.000		
4.01.02.2.03.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		1 BA	1.400.000.000	PIS		1 BA	2.500.000.000		
4.01.02.2.03.01.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-	455 Dokumen	500.000.000	PIS		455 Dokumen	600.000.000		
4.01.02.2.03.02.	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kabupaten Cirebon	10 Kasus	600.000.000	PIS		44 Kasus	1.000.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.01.02.2.03.03.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kabupaten Cirebon	206 Dokumen	300.000.000	PIS		206 Dokumen	900.000.000
4.01.02.2.04.	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah		1 BA	249.600.000	PIS		1 BA	420.000.000
4.01.02.2.04.01.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Dokumen	215.800.000	PIS		1 Dokumen	250.000.000
4.01.02.2.04.03.	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Laporan	33.800.000	PIS		1 Laporan	170.000.000
4.01.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berkualitas		100 Prosen	2.478.257.226			100 Prosen	2.478.257.226
		Prosentase kebijakan Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan		80 Prosen	483.500.000			80 Prosen	1.642.677.295
		Prosentase Koordinasi dalam Meningkatkan Perekonomian		100 Prosen	1.385.499.700			100 Prosen	5.960.350.000
4.01.03.2.01.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		1 BA	980.499.700	PIS		1 BA	5.035.000.000
4.01.03.2.01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	21 Dokumen	457.199.700	PIS		21 Dokumen	1.070.000.000
4.01.03.2.01.02.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	91 Laporan	387.300.000	PIS		91 Laporan	1.950.000.000
4.01.03.2.01.03.	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	7 Dokumen	136.000.000	PIS		7 Dokumen	965.000.000
4.01.03.2.01.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Dokumen	-			1 Dokumen	500.000.000
4.01.03.2.01.05.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Dokumen	-			1 Dokumen	550.000.000

Kode	Usury/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.01.03.2.02.	Administrasi Pembangunan	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Pembangunan		1 BA	556.177.295	PIS		1 BA	1.642.677.295
4.01.03.2.02.01.	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	2 Dokumen	138.500.000	PIS		2 Dokumen	800.000.000
4.01.03.2.02.02.	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Laporan	105.000.000	PIS		3 Laporan	530.000.000
4.01.03.2.02.03.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Sekretariat (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	4 Laporan	312.677.295	PIS		4 Laporan	312.677.295
4.01.03.2.03.	Pengadaan Barang dan Jasa	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa		1 BA	2.478.257.226	PIS		1 BA	2.478.257.226
4.01.03.2.03.01.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Dokumen	671.828.300	PIS		2.000 Dokumen	671.828.300
4.01.03.2.03.02.	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Dokumen	547.885.500	PIS		73 Dokumen	547.885.500
4.01.03.2.03.03.	Peminaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1.050 Orang	1.258.543.426	PIS		1.123 Orang	1.258.543.426
4.01.03.2.04.	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam		1 BA	405.000.000	PIS		1 BA	925.350.000
4.01.03.2.04.01.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	9 Dokumen	210.000.000	PIS		9 Dokumen	587.650.000
4.01.03.2.04.02.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Sekretariat Daerah (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Dokumen	195.000.000	PIS		3 Dokumen	337.700.000
J U M L A H					73.777.885.361				146.298.420.008

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon disusun sejalan dengan tema RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yaitu *“Penguatan Pemulihan Ekonomi secara Inklusif didukung Reformasi Birokrasi Struktural dalam Rangka Peningkatan Daya Saing, Investasi dan Lapangan Kerja”*, dan penjabaran dari tujuan Sekretariat Daerah yang tertuang dalam Renstra yaitu :

1. Meningkatkan peran dan fungsi koordinasi dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan antar dan internal umat beragama
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah

Hasil evaluasi atas Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program / kegiatan / sub kegiatan adalah 100% atau dikategorikan sangat baik.

Diharapkan melalui Renja yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang komprehensif dan terpadu ini, kinerja pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dapat semakin fokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual yang masih dihadapi saat ini.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2024, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan supaya program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan Renja Sekretariat Daerah ini seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja tersebut dengan sebaik-baiknya;
- b. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;

- c. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024;
- d. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan pada tahun 2024 maka perlu didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

BUPATI CIREBON,



Diundangkan di Sumber

pada tanggal -

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

HILMI RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR